

ABSTRAK

Ira Sudiar 3504210018. Implementasi Kebijakan Penataan dan Relokasi Pedagang Pinggir Pantai Barat oleh Bidang Ekonomi Kreatif di Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran. Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Galuh.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh observasi awal diketahui adanya kendala dalam pelaksanaan relokasi ketempat baru, dimana banyak pedagang yang telah berjualan bertahun-tahun dilokasi lama yang dimana tempat tersebut sangat cocok untuk dijadikan tempat berjualan karna banyak peminatnya, kemudian kurangnya pengawasan dan pendampingan dari petugas lapangan setelah dilakukannya relokasi, serta kurangnya pemahaman dari para pedagang dari tujuan kebijakan yang telah disahkan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran, lalu kurangnya daya minat wisatawan pada tempat baru/lokasi baru yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten pangandaran.

Metode yang digunakan yaitu metode Survey dengan pendekatan kualitatif. Responden dalam penelitian ini sebanyak 6 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik penelitian kepustakaan dan teknik penelitian lapangan (observasi,wawancara dan dokumentasi). Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif.

Dari hasil penelitian berdasarkan keseluruhan dimensi yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan relokasi pedagang ke Pusat Belanja Nanjung Elok masih menghadapi berbagai tantangan yang membuat pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Meskipun terdapat beberapa langkah yang berjalan baik, seperti koordinasi kelembagaan dan perencanaan pengembangan kawasan oleh Dinas Pariwisata, sejumlah aspek krusial seperti pendampingan berkelanjutan, pemahaman pedagang terhadap tujuan relokasi, persepsi pengunjung terhadap kenyamanan lokasi, peran organisasi pedagang, hingga kondisi ekonomi pascarelokasi masih menunjukkan kelemahan signifikan. Ketimpangan pendapatan antar pedagang, rendahnya minat pengunjung terhadap kios di lantai atas, serta kurangnya dukungan sosial dan teknis pascarelokasi menjadi indikator bahwa efektivitas kebijakan masih perlu ditingkatkan, baik dari segi pendekatan partisipatif, perbaikan infrastruktur, maupun penguatan komunikasi antara pemerintah, pedagang, dan masyarakat.

Kata Kunci:relokasi pedagang, implementasi kebijakan, tantangan pasca-relokasi

ABSTRACT

Ira Sudiar – 3504210018. Policy Implementation of Structuring and Allocating Street Vendors on the West Coast by the Creative Economy Division of the Tourism Office of Pangandaran Regency. Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences (FISIP), Galuh University.

This research is based on initial observations that revealed several obstacles in the implementation of vendor relocation to a new site. Many vendors had been operating for years in the previous location, which was considered highly strategic due to its popularity among visitors. Issues identified include lack of supervision and assistance from field officers after the relocation, limited understanding among the vendors regarding the objectives of the policy issued by the Pangandaran Regency Government, and the low interest of tourists in the newly designated area. The research employed a survey method with a qualitative approach. The study involved six respondents. Data collection techniques included literature review and field research (observation, interviews, and documentation). The data were analyzed using qualitative data analysis techniques.

The results indicate that the implementation of the vendor relocation policy to the Nanjung Elok Shopping Center still faces multiple challenges that hinder its full effectiveness. While certain aspects such as institutional coordination and area development planning by the Tourism Office have progressed well, critical issues remain. These include the lack of continuous assistance, inadequate understanding among vendors of the policy's objectives, negative visitor perceptions of the new location, limited involvement of vendor organizations, and economic difficulties faced by vendors post-relocation. Income disparities among vendors, low visitor interest in upper-floor kiosks, and the lack of social and technical support after relocation further indicate that the policy's effectiveness needs to be improved through a more participatory approach, infrastructure enhancement, and strengthened communication between the government, vendors, and the community.

Keywords: *vendor relocation, policy implementation, post-relocation challenges*